

Jurnal **ERA HUKUM** Ilmiah Ilmu Hukum

**Pemberlakuan Ketentuan UU yang Bertentangan
dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi
(Kajian terhadap Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002)**

Rasji

**Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Dilihat
dari Fungsi Administrasi Negara dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Dwi Andayani Budistyowati

**Tanggung Jawab Negara Peluncur
terhadap Pihak yang Dirugikan dalam
Peluncuran dan Pengoperasian
Satelit Ruang Angkasa**

Amad Sudiro

**Komparasi Pengaturan
Persekongkolan Tender
di Indonesia dan Jepang
dalam Perspektif
Hukum Persaingan Usaha**

L. Budi Kagramanto

**Sertifikat sebagai
Tanda Bukti Hak Atas Tanah**

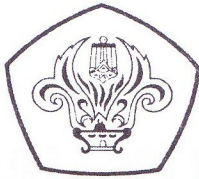
Urip Santoso

**The Developing Countries and
The World Trade Organization:
Making The Most of
The Membership in
The Problematic System**

Ronald Lengkong

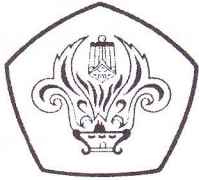


**Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum UNTAR**



DAFTAR ARTIKEL

Pemberlakuan Ketentuan UU yang Bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002)	
Rasji	603
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Dilihat dari Fungsi Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
Dwi Andayani Budistyowati	627
Tanggung Jawab Negara Peluncur terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Peluncuran dan Pengoperasian Satelit Ruang Angkasa	
Amad Sudiro	641
Komparasi Pengaturan Persekongkolan Tender di Indonesia dan Jepang dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	
L. Budi Kagramanto	656
Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah	
Urip Santoso	679
The Developing Countries and The World Trade Organization: Making The Most of The Membership in The Problematic System	
Ronald Lengkong	699



Jurnal **ERA HUKUM** Ilmiah Ilmu Hukum

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Ketua Dewan Penyunting: Rasji, S.H., M.H.

Penyunting Pelaksana: R.M. Gatot P. Soemartono, S.H., S.E., M.M., LL.M.
Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A.
Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Penyunting Penelaah: Prof. Dr. Arifin P. Soeria-Atmadja, S.H.
Prof. Dr. Bernard Arief Shidarta, S.H.
Prof. H. Dardji Darmodiharjo, S.H.
Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., M.L.
Prof. Dr. Maria S.W. Soemardjono, S.H., M.C.L., M.P.A.
Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.P.A.
Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Dr. Etty Utju Ruhayati, S.H., M.H.
Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.

Staf Administrasi : Sumarno, S.H., M.M.
Novi Epilia
Oscar Ronald

Sekretariat: Gedung M Lantai 8, Kampus Universitas Tarumanagara
Jalan Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
Telp. (021)-5671748, 5604477, fax. (021)-5638336
E-mail: erahukum@tarumanagara.ac.id

Rekening FH Untar: BCA Capem Untar No. 001-371702-5

Pengganti ongkos cetak: Rp. 45.000/tiga edisi (satu tahun), bayar di muka.

Jurnal Ilmiah "Era Hukum" adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum di lingkungan Universitas Tarumanagara. Jurnal ini berskala nasional, terbit tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei, dan September.

Petunjuk singkat penulisan tercantum pada sampul belakang sebelah dalam.

TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PELUNCURAN DAN PENGOPERASIAN SATELIT RUANG ANGKASA

Amad Sudiro*

ABSTRACT

The validity of the freedom regime in outer space regulated in the Outer Space Treaty in 1967 brings about many countries able to explore freely and use the outer space. One of the use of outer space is marked with various outer space satellite launching and operation which may cause a failure and hazard and or big loss on the surface of the earth such as the space shuttle explodes, the rocket does not meet the target or possibly the space objects drop down or the debris which enters the earth orbit so that causes a damage for another party. This will create another international responsibility related with the jurisdiction problem and controlled by the launching State to its space objects in the outer space.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Peluncuran, Pengoperasian Satelit.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi penerbangan sesudah berakhirnya perang dunia kedua membawa akibat terhadap kehidupan manusia sekarang, yang telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan baik ke ruang udara maupun ke ruang angkasa. Kemajuan teknologi ini tidak saja berpengaruh di bidang politik, ekonomi, militer dan kebudayaan, tetapi juga berpengaruh di bidang hukum. Khusus mengenai kegiatan pemanfaatan ruang angkasa ditandai dengan peluncuran satelit milik Uni

Soviet (sekarang Rusia) pada tahun 1957 yaitu satelit Sputnik I. Sejak saat itu ruang angkasa yang tadinya kosong mulai diisi dengan berbagai benda ruang angkasa, terutama dari negara-negara yang mempunyai kemampuan teknologi tinggi seperti Amerika Serikat dan Rusia dengan fungsi dan tujuan yang bermacam-macam.

Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa tersebut menimbulkan juga kekhawatiran umat manusia di planet bumi, karena selain kegiatan itu berdampak positif tetapi dapat juga berdampak negatif, sebab ada kemungkinan penggunaannya untuk maksud dan tujuan yang tidak damai atau dapat pula menim-

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta